

## **ABSTRAK**

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kekerasan yang dimaksud dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan seksual yang dapat dialami oleh seseorang yang rentan menjadi korban kekerasan, dalam hal ini adalah anak-anak dan perempuan. Dengan adanya celah dari KUHP yang dianggap belum sepenuhnya dapat melindungi korban kekerasan seksual, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Selanjutnya disebut UU TPKS). Perumusan masalah pada penelitian ini untuk mengetahui dampak perkawinan paksa dan bentuk perlindungan bagi korban. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak dari perkawinan paksa terhadap anak di bawah umur dan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami perkawinan paksa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode library research, teknik pengumpulan data, teknik penyajian data dan teknik analisis data. Perkawinan secara paksa pasti memiliki bermacam-macam dampak yang nampak serius dan merugikan bagi perkembangan dan kesejahteraan pada anak-anak. Dampak-dampak itu meliputi dampak bagi pendidikan, dampak pada kesehatan fisik dan psikis anak yang terganggu, dampak ketidakharmonisan keluarga, dampak siklus kemiskinan, dan ketidaksetaraan gender. Upaya perlindungan hukum juga dapat menjadi bantuan bagi korban agar pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatan yang sudah dilakukan. Perkawinan paksa mempunyai berbagai pengaruh yang serius bagi anak di bawah umur. Anak-anak yang dipaksa menikah mengalami risiko fisik, emosional dan psikologis yang berdampak besar.

**Kata Kunci:** *anak; kekerasan; hukum; perlindungan.*

## ***ABSTRACT***

*In Indonesia, cases of sexual violence have increased every year, victims not only from adults have now penetrated teenagers, children and even toddlers. The violence in question can be in the form of physical violence, verbal violence, or sexual violence that can be experienced by someone who is vulnerable to becoming a victim of violence, in this case children and women. With the loopholes in the Criminal Code that are considered unable to fully protect victims of sexual violence, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Criminal Acts (hereinafter referred to as the TPKS Law) was formed. The formulation of the problem in this study is to determine the impact of forced marriage and forms of protection for victims. The purpose of this study is to determine the impact of forced marriage on minors and the form of legal protection for children who experience forced marriage according to Law Number 1 Year. For this research method using library research methods, data collection techniques, data presentation techniques and data analysis techniques. Forced marriage must have a variety of seemingly serious and detrimental effects on the development and well-being of children. These impacts include impacts on education, impacts on children's physical and psychological health that are disrupted, the impact of family disharmony, the impact of poverty cycles, and gender inequality. Legal protection efforts can also be an aid for victims so that perpetrators get appropriate sanctions for actions that have been done. Forced marriage has serious effects on minors. Children who are forced into marriage experience physical, emotional and psychological risks that have a profound impact.*

**Keywords:** child; violence; law; protection.